

**SKRIPSI**



**EFEKTIVITAS DIGITALISASI PENGELOLAAN  
LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI EMPAT PILAR  
MPR DI DAERAH PEMILIHAN**

Disusun Oleh:

Nama : Hizam Fauzi

NPM : 2112121164

Jurusan : Kebijakan Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**



**EFEKTIVITAS DIGITALISASI PENGELOLAAN  
LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI EMPAT PILAR  
MPR DI DAERAH PEMILIHAN**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Terapan Oleh**

**NAMA : HIZAM FAUZI  
NPM : 2112121164  
JURUSAN : KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI : APN**

**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

NAMA : HIZAM FAUZI  
NPM : 2112121164  
JURUSAN : KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
JUDUL : EFEKTIVITAS DIGITALISASI PENGELOLAAN  
LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI EMPAT  
PILAR MPR DI DAERAH PEMLIHAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada tanggal 7 Juni 2024

Pembimbing



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si.)

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada (14-Juni-2024).

Ketua merangkap Anggota



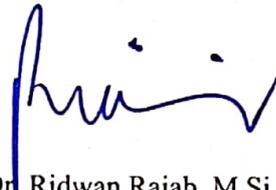
(Bambang Suhartono, S.Sos., M.E.)

Sekretaris merangkap Anggota



(Nila Kurnia Wati, S.AP., M.AP.)

Anggota



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si.)

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hizam Fauzi  
NPM : 2112121164  
Jurusan : Kebijakan Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **Efektivitas Digitalisasi Pengelolaan Laporan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta,

Penulis,



(Hizam Fauzi)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil A'lam*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“Efektivitas Digitalisasi Pengelolaan Laporan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Tujuan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang berlokasi di Sekretariat Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekretariat Kelompok DPD di MPR).

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok DPD Bapak Adi Christianto Depparinding, S.IP., M.Si., selaku pembimbing Instansi yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini banyak kekeliruan dan kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Sekretariat Jenderal MPR dalam meningkatkan layanan kepada Anggota MPR.

Jakarta, Juni 2024

Penulis  
Hizam Fauzi



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## Abstrak

### **Judul: Efektifitas Digitalisasi Pengelolaan Laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan**

Disusun oleh: Hizam Fauzi  
Dosen Pembimbing: Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan, dan inkonsistensi yang berkaitan terhadap pilar-pilar konsepsi berkehidupan berbangsa dan bernegara bisa membawa berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan dalam perikehidupan kebangsaan. Oleh sebab itu, MPR yang Anggotanya berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing tentang pilar-pilar konsepsi tersebut atau dikenal sebagai Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan. Dalam rangka tanggungjawab akuntabilitasnya, setiap Anggota MPR wajib menyusun laporan setelah menyelesaikan kegiatan sosialisasi melalui Sekretariat Jenderal MPR RI. Mulai bulan Juni 2023, Sekretariat Jenderal MPR menetapkan kebijakan prosedur penyusunan hingga penyerahan laporan kegiatan sosialisasi menggunakan sistem berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif sistem pengelolaan laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan berbasis digital yang diterapkan di MPR. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan dua teori yaitu teori efektivitas menurut Gibson dan teori pengelolaan menurut Ernie & Syaefullah. Hasil dari penelitian diketahui bahwa digitalisasi pengelolaan laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan telah memenuhi indikator pengukuran yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan penerapan kebijakan digitalisasi berjalan efektif. Namun masih ditemukan beberapa hal antara lain aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan instansi dan belum ada peraturan internal yang khusus tentang objek yang diteliti sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas. Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran yaitu pengembangan aplikasi berbasis system informasi serta membuat peraturan internal Sekretariat Jenderal MPR yang khusus tentang pengelolaan laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan berbasis digital. Tugas akhir berisi 12 halaman menggunakan huruf latin dan 84 halaman menggunakan Angka Arab.

**Kata Kunci:** efektivitas; digitalisasi; pengelolaan; laporan; sosialisasi.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## ***Abstract***

### ***Title: Effectiveness of Digitizing The Management of Reports on The Socialization of The Four Pillars of The MPR in Electoral Districts***

*Arrange by Hizam Fauzi  
Assistant Lecturer by Dr. Ridwan Rajab, M.Si.*

*Since the founding of the Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945, historical experience has shown that neglect, betrayal and inconsistencies related to the pillars of the concept of national and state life can bring various problems, downturns, suffering and divisions in national life. Therefore, the MPR, whose members come from all regions in Indonesia, has an obligation to provide understanding to the people in their respective electoral districts about the pillars of this concept or known as Socialization of the Four Pillars of the MPR in Electoral Districts. In the framework of their accountability responsibilities, each MPR Member is obliged to prepare a report after completing outreach activities through the Secretariat General of the MPR RI. Starting in June 2023, the MPR Secretariat General will establish a policy on procedures for preparing and submitting reports on socialization activities using a digital-based system. This research aims to find out how effective the digital-based management system for the Socialization of the Four Pillars of the MPR in Electoral Districts is implemented in the MPR. In conducting research, the author used a qualitative descriptive approach based on two theories, namely effectiveness theory according to Gibson and management theory according to Ernie & Syaefullah. The results of the research show that the digitalization of the management of the Socialization of the Four Pillars of the MPR report in the Electoral District has met the measurement indicators that have been determined, so it can be said that the implementation of the digitalization policy has been effective. However, several things were still discovered, including that the application used did not fully meet the agency's needs and there were no specific internal regulations regarding the object under study as a reference for stakeholders to carry out their duties. Therefore, researchers provide suggestions, namely developing information system-based applications and creating internal regulations for the Secretariat General of the MPR specifically regarding the management of digital-based reports on socialization activities for the Four Pillars of the MPR in electoral districts. The final assignment contains 12 pages using Latin letters and 84 pages using Arabic numerals.*

***Keywords:*** *effectiveness; digitalization; management; report; socialization.*



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	
KATA PENGANTAR .....	i
Abstrak .....	iii
<i>Abstract</i> .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Kebijakan Dan Teori .....	11
1. Tinjauan Kebijakan .....	11
2. Tinjauan Teori .....	14
a. Pengertian Pengelolaan .....	14
b. Pengertian Sosialisasi .....	15
c. Pengertian Laporan .....	16
d. Pengertian Digitalisasi .....	20
e. Pengertian Efektivitas.....	23
f. Pengelolaan Laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan .....	26
B. Konsep Kunci .....	32

	<b>Hal</b>
1. Perencanaan dan Pengorganisasian .....	33
2. Pengarahan dan Implementasi .....	33
3. Pengendalian dan Pengawasan .....	33
C. Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metodologi Penelitian .....	35
B. Teknik Pengumpulan Data .....	35
C. Instrumen Penelitian .....	37
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penyajian Data .....	39
1. Gambaran Umum .....	39
a. Sejarah Sosialisasi Empat Pilar MPR .....	41
b. Penyusunan Laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai bentuk Akuntabilitas .....	43
c. Digitalisasi Pengelolaan Laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR .....	45
5. Deskripsi Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan.....	70
1. Perencanaan dan Pengorganisasian .....	71
2. Pengarahan dan Implementasi .....	74
3. Pengendalian dan Pengawasan .....	75
C. Sintesis Pemecahan Masalah .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1. Komposisi Keanggotaan Fraksi/Kelompok DPD di MPR ..	5
Tabel 2. Konsep Kunci Efektivitas Digitalisasi Pengelolaan Laporan Kegiatan Sosdapil .....	32
Tabel 3. Rekapitulasi Laporan Kegiatan Sosdapil Secara Konvensional .....	57
Tabel 4. Rekapitulasi Laporan Sosdapil Menggunakan Sistem Berbasis Digital .....	58

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1. Keanggotaan MPR RI .....	12
Gambar 2. Penyiapan sarana pengajuan kegiatan Sosdapil melalui aplikasi Sipilarmpr.com .....	28
Gambar 3. Penyiapan sarana administrasi keuangan melalui aplikasi <a href="http://www.ematrix.setjen.mpr.go.id">www.ematrix.setjen.mpr.go.id</a> .....	28
Gambar 4. Proses Bisnis Pelaksanaan Sosdapil oleh Anggota MPR .....	30
Gambar 5. Kerangka Berpikir .....	34
Gambar 6. Struktur Organisasi Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI.....	40
Gambar 7. Formulir Laporan Kegiatan Sosdapil oleh Anggota MPR .....	48
Gambar 8. Kolom isian dengan jenis data teks .....	49
Gambar 9. Kolom isian dengan jenis data pilihan .....	49
Gambar 10. Kolom isian dengan jenis data gambar .....	50
Gambar 11. Output Dokumen Laporan Kegiatan Sosdapil .....	51
Gambar 12. Template tanda terima laporan.....	51
Gambar 13. Alur Penerapan Prosedur Kebijakan Pengelolaan Sosialisasi di Daerah Pemilihan .....	55



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

# **BAB I**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan, dan inkonsistensi yang berkaitan terhadap pilar-pilar konsepsi berkehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat menimbulkan berbagai masalah dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat pilar konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa ini untuk dapat berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke-Indonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pengabaian, pengkhianatan, dan inkonsistensi terhadap pilar-pilar konsepsi berkehidupan berbangsa dan bernegara, telah terbukti dengan adanya berbagai peristiwa dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Peristiwa yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia secara politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan misalnya peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan DI/TII tahun 1949, Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1950, Gerakan 30S/PKI tahun 1965, dan Konflik Reformasi Mei tahun 1998. (Natasya Humaira, 2023).

Peristiwa politik reformasi terjadi pada bulan Mei tahun 1998 diawali dengan adanya peristiwa krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Krisis ekonomi ini mengakibatkan harga-harga

melambung tinggi dan merosotnya nilai tukar rupiah. Hal tersebut mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dengan berbagai tuntutan. (Albertus Adit, 2022). Tuntutan reformasi tersebut antara lain:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (Otonomi Daerah).
5. Mewujudkan kebebasan pers.
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dari beberapa tuntutan tersebut, berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia belum cukup memuat landasan dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, muncul desakan yang kuat dari berbagai kalangan masyarakat adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014).

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdampak pada perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan juga perubahan konsepsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan antara lain MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain sehingga MPR tidak lagi dapat membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Ketetapan MPR. Selain itu, ada lembaga negara yang dihapus dan ada lembaga negara baru yang dibentuk.

Perubahan paradigma berkehidupan berbangsa dan bernegara antara lain penegasan sistem presidensial yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Terwujudnya otonomi daerah yang mengubah sistem perekonomian yang sentralistis menjadi desentralistis.

Perubahan dalam tatanan berkehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, haruslah dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh berbagai komponen bangsa. Maka dari itu, diperlukan adanya usaha sengaja untuk melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan menyangkut konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, MPR berpandangan bahwa pentingnya untuk menyebarluaskan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kepada berbagai elemen masyarakat antara lain para penyelenggara negara pusat dan daerah serta segenap warga negara Indonesia.

Sejak tahun 2005, MPR telah melakukan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan dan Ketetapan MPR ke berbagai kalangan masyarakat. Namun, keberhasilan yang diupayakan sebagai pelaksanaan dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sendirinya menjamin apa yang dikehendaki oleh konstitusi dapat terwujud. Pada tingkat implementasi, masih ditemukan adanya deviasi dan distorsi dalam kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi. Oleh sebab itu, menjadi konsesus bersama bahwa selain sosialisasi terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR juga perlu untuk mensosialisasikan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang dikenal dengan Empat Pilar MPR RI. Hal tersebut dilakukan agar para penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi pemahaman Empat Pilar MPR adalah untuk mengingatkan

kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu-padu mengisi pembangunan, agar bangsa ini dapat lebih maju dan sejahtera. Empat Pilar MPR dipandang sebagai suatu sebagai keharusan pemahaman yang dimiliki oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya.

MPR dalam melaksanakan sosialisasi menggunakan berbagai metode. Salah satu metode yang digunakan yaitu melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan oleh Anggota MPR. Metode ini dipilih karena MPR merupakan sebuah lembaga yang anggotanya mencerminkan keterwakilan politik rakyat dan daerah, yaitu terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota MPR yang berjumlah sebanyak 711 orang, masing-masing mewakili daerah pemilihannya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komposisi jumlah Anggota MPR dapat dilihat pada Tabel 1.

Pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan merupakan tanggung jawab Anggota MPR sebagai perwakilan masyarakat dan daerah dalam memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Pentingnya sosialisasi di daerah pemilihan Anggota MPR adalah dalam rangka manifestasi tugas Anggota MPR untuk membangun daerah agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tabel 1:

## Komposisi Keanggotaan Fraksi/Kelompok DPD di MPR

NO	FRAKSI/KELOMPOK DPD	JUMLAH ANGGOTA
1.	Fraksi PKB	58 orang
2.	Fraksi Partai Gerindra	78 orang
3.	Fraksi PDI Perjuangan	128 orang
4.	Fraksi Partai Golkar	85 orang
5.	Fraksi Partai NasDem	59 orang
6.	Fraksi PKS	50 orang
7.	Fraksi PPP	19 orang
8.	Fraksi PAN	44 orang
9.	Fraksi Partai Demokrat	54 orang
10.	Kelompok DPD	136 orang
	JUMLAH	711 orang

*Sumber: Surat Keputusan MPR RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Fraksi dan Kelompok DPD MPR RI Masa Jabatan 2019-2024*

Berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh MPR pada Tahun Anggaran 2023, setiap Anggota MPR akan melaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Daerah Pemilihan. Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan wewenang dan tugas Anggota MPR RI dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Daerah Pemilihannya, Anggota MPR berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui Sekretariat Jenderal MPR. Sekretariat Jenderal MPR akan melakukan pengelolaan terhadap dokumen laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan yang telah diserahkan oleh anggota MPR. Dokumen laporan kegiatan tersebut kemudian dijadikan sebagai arsip untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pemeriksaan oleh BPK.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal MPR merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia. Untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR khususnya pada pengelolaan dokumen laporan, Sekretariat Jenderal MPR membuat kebijakan berupa prosedur sistem pelaporan. Sejak dilakukannya sosialisasi pada tahun 2005, sistem pelaporan kegiatan masih menggunakan sistem konvensional atau masih menggunakan dokumen fisik kertas.

Mengikuti perkembangan jaman dan tuntutan akan kebutuhan penyajian informasi yang cepat dan mudah terutama dokumen laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR, Sekretariat Jenderal MPR menerapkan prosedur sistem pelaporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan menggunakan teknologi digital atau berbasis digital yang dimulai pada bulan April 2023. Teknologi digital yang digunakan dalam pengelolaan dokumen laporan yaitu menggunakan *google form*.

*Google form* adalah fitur layanan yang disediakan oleh *google* berupa formulir online yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat survey, pendaftaran, dan tes secara daring. *Google Form* mudah diakses dan mendukung kolaborasi secara *real time*. Dengan kemampuannya ini, pengguna bisa mendapatkan tanggapan dan data dari pengguna secara langsung, usai formulir diisi.

Penggunaan *Google Form* pada pengelolaan laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan bagi para pemangku kepentingan seperti Anggota MPR, para pengambil kebijakan, dan pengelola dokumen. Selain itu, pengalihan dari pengelolaan dokumen laporan sistem konvensional dan beralih ke teknologi digital karena dirasakan dokumen kertas memiliki banyak kelemahan, antara lain:

1. Memerlukan Tempat Penyimpanan Yang Luas

Satu dokumen laporan kegiatan sosialisasi berisi satu bundel kertas dengan ketebalan yang berbeda-beda. Dalam satu tahun, terdapat 711 laporan dikalikan 6 kegiatan, maka seluruh dokumen berjumlah 4.266 dokumen.

## 2. Pencarian Dan Penyediaan Dokumen Kurang Cepat

Dokumen laporan yang telah lebih dulu diserahkan, akan tertumpuk oleh dokumen laporan yang baru diserahkan. Meskipun dengan kodefikasi tertentu, namun pencarian dokumen laporan sulit untuk ditemukan. Selain itu, pada penggunaan dokumen sebagai bahan pemeriksaan BPK, maka harus memindahkan dokumen fisik tersebut dari lokasi penyimpanan ke lokasi pemeriksaan BPK.

## 3. Berbiaya Tinggi Dan Tidak Ramah Lingkungan

Dokumen laporan sosialisasi akan dicetak oleh Anggota MPR memerlukan menggunakan printer, tinta printer, dan kertas. Jika dilakukan oleh 711 orang dan masing-masing sebanyak 6 kali, maka berapa pohon yang dibutuhkan untuk membuat kertas? Belum lagi adanya kesalahan-kesalahan cetak, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tentu saja hal tersebut merusak lingkungan.

## 4. Kurang Efektif Dalam Menyelesaikan Pekerjaan

Setiap kali selesai melaksanakan sosialisasi di daerah pemilihannya, Anggota MPR menyusun laporan dan menyerahkannya melalui Sekretariat Jenderal MPR. Dengan menggunakan dokumen laporan dalam bentuk kertas, maka Anggota MPR harus hadir fisik ke lokasi penyerahan atau dengan bantuan layanan pengiriman.

Maka, dengan beralihnya sistem pelaporan dari konvensional ke digital, diharapkan dapat mempermudah anggota MPR untuk menyusun laporan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihannya. Selain itu, dengan sistem berbasis digital, pengelolaan dokumen laporan sosialisasi dapat lebih efektif. Karena dengan platform *google form* sebagai basis teknologi yang digunakan, dianggap memiliki berbagai kelebihan antara lain:

### 1. Mudah Digunakan

*Google form* sudah familier di kalangan masyarakat terutama dalam pengisian survey dan pengisian formulir pendaftaran. Dengan tampilan formulir daring yang sederhana, jadi sangat mudah dipahami dan

digunakan.

## 2. Mudah Diakses

*Google form* adalah aplikasi yang *open source*, sehingga sangat mudah untuk diakses. Karena siapa saja yang memiliki tautan, dapat mengaksesnya.

## 3. Media Penyimpanan Dalam Bentuk Elektronik

Dokumen hasil dari *google form* akan tersimpan dalam *google drive* dalam bentuk dokumen elektronik, sehingga tidak memerlukan tempat penyimpanan fisik.

## 4. Pengelolaan Dokumen Laporan Menjadi Lebih Efektif Dan Efisien

Dengan *google form*, anggota MPR tidak perlu lagi hadir fisik saat penyerahan laporan tetapi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dokumen dalam bentuk elektronik sangat mudah dalam pencarian dan pemanfaatannya, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan akan dengan cepat ditemukan dan digunakan. Selain itu, *google form* adalah aplikasi tidak berbiaya sehingga lebih efisien dibanding sistem konvensional.

Prosedur pengelolaan laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan oleh anggota MPR dengan memanfaatkan teknologi digital melalui *google form*, merupakan kebijakan Sekretariat Jenderal MPR yang diterapkan mulai bulan April 2023 yaitu pada Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan Tahap III tahun 2023 melalui Surat *Plt. Sekretaris Jenderal MPR Nomor B-31/PE.01/B-VI/SetjenMPR/04/2023 Tanggal 4 April 2023: Hal Sosialisasi Empat Pilar MPR oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan Tahap III*. Dalam surat edaran tersebut terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihan. Pedoman pelaksanaan berisi tata cara pelaksanaan pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Digitalisasi pengelolaan laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan merupakan sebuah transformasi prosedur dari yang semula bersifat konvensional menjadi digital. Penerapan prosedur tersebut tentu memiliki tujuan supaya pekerjaan pengelolaan dokumen laporan menjadi lebih

efektif. Namun, dalam penerapan prosedur pekerjaan yang baru, tentu saja menghadapi berbagai kendala. Apakah para pengguna dengan mudah menggunakan system yang baru? Apakah para pengguna diberikan pemahaman sebelum menggunakan system yang baru? Apakah tersedia sarana dan prasarana yang mencukupi? Kendala apa saja yang dihadapi? Nah, beberapa pertanyaan seperti itu pasti muncul saat terjadi perubahan sistem terutama dengan penggunaan teknologi digital.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi penelitian ini berfokus terhadap materi yang berkaitan dengan penerapan digitalisasi pengelolaan laporan Sosialisasi di Daerah Pemilihan. Rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas digitalisasi pengelolaan laporan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektif digitalisasi pengelolaan laporan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Akademis**

Secara akademis penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang kebijakan terutama pada penerapan kebijakan digitalisasi. Dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan kebijakan digitalisasi pada pengelolaan laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR oleh Sekretariat Jenderal MPR.

- b. Sebagai penyampaian informasi dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya penelitian ini berisi berbagai topik, meskipun berfokus pada digitalisasi pengelolaan laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan.

## **2. Manfaat Secara Teknis**

Secara teknis penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

- a. Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan  
Pemimpin organisasi bertanggungjawab untuk membuat keputusan. Oleh sebab itu diperlukan sumber otentik untuk mendapatkan informasi yang jelas, sehingga keputusan terbaik pun bisa diambil.
- b. Sebagai Bahan Analisis  
Sebuah hasil penelitian juga merupakan sumber yang sangat penting sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini memuat rincian informasi mengenai berbagai masalah yang dapat di analisis sebagai penyebab masalah.
- c. Sebagai Alat Pengawasan Dan Bahan Evaluasi  
Hasil penelitian ini memuat berbagai informasi bagaimana laporan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan itu dikelola dan dapat diketahui seberapa efektif kebijakan dalam bentuk prosedur pengelolaan laporan. Sehingga, dapat dijadikan masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.